

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sobirin. 2007. *Budaya Organisasi: Pengertian, makna dan aplikasinya dalam kehidupan organisasi*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.
- Andi Hamzah. 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Raganan.
- Azhar Kasim. 1995. *Teori Pembuatan Keputusan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Bagir Manan dan Kuntana, Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: Alumni.
- Barda Nawawi Arif. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Kencana.
- 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Buchari Said. 2008. *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht)*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana. 2024. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Elwi Danil. 2014. *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Etty Indriaty. 2014. *Pola dan Akar Korupsi, Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika.

- I Made Pria Dharsana. 2012. *Teori Kepastian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iza Fadri. 2013. *Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia, Studi Kasus Pencurian Listrik dan Upaya Penanggulangannya*. Jakarta: PTIK PRESS.
- J. Salusu. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Grasindo.
- Jimly Asshiddiqie. 2017. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juniadi Soewartojo. 1998. *Korupsi, Pola Kegiatannya dan Penindakannya serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Kimberly Ann Elliot. 1999. *Korupsi dan Ekonomi Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mien Rukimini. 2010. *Aspek Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Moch. Faisal Salam. 2004. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Patuan Sinaga. 2001. *Hubungan Antara Kekuasaan Dengan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1994. *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*. Surabaya: UNAIR.
- Poerwadarminta, WJS. 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim HS dan Erlies SN. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke -1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Shant Dellyana. 2007. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Simanjuntak, R. 2018. *Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Siti Aisyah. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Militer*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukron Kamil. 2013. *Korupsi dan Integritas Dalam Ragam Perspektif*. Jakarta: Pusat Studi Indonesia-Arab-PSIA.

Susan Rose-Ackerman. 2006. *Korupsi Pemerintahan, Sebab, Akibat dan Reformasi*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.

B. Jurnal

Ahmad Jamaludin, "Problematisasi Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota TNI Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN, Vol.8 No.2, Agustus 2022.

Asep Satria Purnama dkk, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Aktif Yang Menduduki Jabatan Sipil Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum SETARA*, Vol. 5 No. 2, (Desember 2024).

Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern", *Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014* <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 17 Februari 2025.

Ermansjah Djaya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK kajian Yuridis Normatif UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Versi UU No. 30 Tahun 2002*, Cet. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, (2008)

Gaung Wira Utama, Adi Mansar, Eka N.A.M Sihombing, "Optimalisasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Volume 5 Nomor 2, Feb 2024 – Mei 2024*.

Habibul Umam Taqiuddin, (2017), "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/343> Vol 1, No 2, hlm. 191, diakses pada 28 Februari 2025.

- Hafrida, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Kota Jambi", *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, Hlm. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014.
- Haryadi, "Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2F&f=false&view_op=Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAAJ%3ASe3iqnhoufwC%26tzm%3D-420.
- Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, "Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi", *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).
- Hendra Mulyadi, "Penerapan Asas Kepentingan Militer Dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap Prajurit Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Pada Pengadilan Militer I-03/Padang", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol. 4, No 2, Maret 2019.
- Iman Jauhari, "Kajian Yuridis Terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Mercatoria*, Vol.1 No.2. Februari 2008.
- Imanuel, "Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil". *Jurnal Hakim dan Keadilan*, Vol. 3, No. 4, (2020).
- Kadek Widya Antari, et al, (2019), "Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Nomen (Konflik Norma), antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar -Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah", *Jurnal Komunitas Yustisia*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28775> , Vol 2, No 2, hlm. 89, diakses pada 28 Februari 2025.
- Meta Suriyani, (2016), "Pertentangan Asas Perundang-undangan dalam Pengaturan Larangan Mobilisasi Anak pada Kampanye Pemilu", *Jurnal Konstitusi*, <https://media.neliti.com/media/publications/113733-ID-pertentangan-asas-perundang-undangan-dal.pdf>, hlm. 69, diakses pada 28 Februari 2025.

- Muhammad Ishar Helmi, "Penerapan Azas Equality Before the Law Dalam Sistem Peradilan Militer", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, (September-November, 2013).
- Ones Marsahala Panungkunan Pakpahan dkk, "Kewenangan KPK dalam penanganan kasus tipikor di lingkungan TNI menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang KPK" *Jurnal Lex Privatum* Vol. IX/No. 8/Jul/2021.
- Priska V.O. Rumate, Daniel F. Aling, Marchel Maramis, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer", *Jurnal Lex Administratum*, Volume 11, nomor 1, 2023.
- Rizky Maulana Agung, "Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil". *Jurnal Hakim dan Keadilan*, Vol. 1, No. 4, hlm. 202, (2023).
- Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, "Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa", *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, p-ISSN:2580-1120 e-ISSN:2580-2178 LPPM Universitas Jambi, diakses melalui <https://scholar.google.co.id/citations?user=cvtqBCgAAAJ&hl=id>, tanggal akses 17 Februari 2025.
- Selfi Suriyadinata, Ananda Putra Rezeki, "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* Vol. 5 No. 1 2023.
- Slamet Suhartono, (2019), "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum*, diakses melalui <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/download/2549/pdf>, Vol 15, No 2, hlm. 201-205, tanggal akses 28 Februari 2025.
- Sukanto Satoto dan Bahder Johan Nasution, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik", LPPM Universitas Jambi, *Jurnal Sains Sosio Huaniora* P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019.
- Triyanto, G. "Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Rechten*, Vol. 6(1), 2017.

VE. Roman, "Militer dan Sistem Peradilan Militer", *eJournal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta, 2018.

Usman dan Andi Najemi, "Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya", *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Ddid%26user%3DINKF-G0AAAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAAJ%26tzm%3D-420.

Widodo Tresno N, "Korporasi Sebagai Subyek Tipikor dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Yustitia*. No. 70 Media Januari-April. Surakarta: FH UNS, (2007).

Yoses Ondrasi Telaumbanua, Hasruddin Pagajang, Simona Bustani, "Wewenang KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI aktif dikaji dari teori hukum pembangunan" *Jurnal Advances in Social Humanities Research* Vol 1 No. 11 Januari 2024.

Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan", *Jurnal Humaniora* Vol.3 No.2 Oktober 2012: 345-353.

Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019", *Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Volume 18, Nomor 2, Juni 2021. hlm. 12.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

-----Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

----- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

----- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

----- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

D. Internet

Aji Prasetyo, "KPK Apresiasi Putusan MK Terkait Kewenangan Usut Korupsi Anggota Militer", Hukum Online.com, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-apresiasi-putusan-mk-terkait-kewenangan-usut-korupsi-anggota-militer-lt674a820e67887>, tanggal akses 23 Mei 2025.

Arief Wahyudi, Arief Nurul Wicakso, "*Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum*", sie Infokum-Ditama Binbangkum, diakses melalui [www.http://Kajian uang pengganti](http://Kajian uang pengganti), tanggal akses 28 Mei 2025.

Diah Restuning Maharani, *Teori Kewenangan*, diakses melalui <http://restuningmaharani.com>, diakses pada tanggal 25 Maret 2025.

Dian Erika Nugraheny dan Nursita Sari, "Ketika KPK Minta Maaf, Mengakui Khilaf Kabasarnas sebagai Tersangka Suap", Kompas.com, 29 Juli 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/29/07251341/ketika-kpk-minta-maaf-mengakukhilaf-karena-tetapkan-kabasarnas> sebagai tersangka, tanggal akses 12 Maret 2025.

Fauzi Ferdian, "Danpuspom: Penetapan Tersangka Prajurit TNI oleh Salahi Ketentuan", CNN Indonesia, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230728145653-12979088/danpuspom-penetapan-terseangka-prajurit-tni-oleh-kpk-salahi-ketentuan>, tanggal akses 12 Maret 2025.

Fika Nurul Ulya, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, "KPK Berwenang Usut Kasus Korupsi Militer Usai Ribut-ribut Perkara Mantan Kabasarnas", Artikel Kompas.com, 2024.

Gandjar Laksmarna Bonaprapta, "Kenapa Takut! KPK Berwenang Menangani Anggota TNI Dalam Kasus Basarnas", Abraham Samad Podcast, 1 Agustus 2023, diakses melalui <https://youtu.be/PqxQgCSrSgA?si=zMMGv7iyGo16q6Jp>, tanggal akses 23 Mei 2025.

Jimly Ashidiqie, "*Penegakan Hukum*", diakses melalui <http://solusihukum.com>, tanggal akses 25 Maret 2025.

Randy Ferdiansyah, "*Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*", diakses melalui <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, tanggal akses 11 Mei 2025.

Utami Argawati, "KPK Kendalikan Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tipikor Sepanjang Perkara Dimulai oleh KPK", *Humas MKRI*, diakses melalui <https://testing.mkr1.id/berita-Apk-kendalikan-penyelidikan,-penyidikan,-dan-penuntutan-tipikor-sepanjang-perkara-dimulai-oleh-kpk-21900>, tanggal akses 23 Mei 2025.

Willa Wahyuni, "Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI/Polri, Bolehkah?", *Hukum Online*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengisian-jabatan-sipil-oleh-tni-polri-bolehkah-3678e1908e044f>, tanggal akses 23 Mei 2025.